



Migrant Care Sinyalir Terjadi Jual-Beli Suara di Malaysia

Jakarta, MIMBAR - Perumpulan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat Migrant Care menemukan sekitar 10 kotak pos terbengkalai di 3 apartemen di Malaysia. Pihaknya menyebut apartemen-apartemen itu banyak dihuni warga negara Indonesia yang seharusnya menerima surat suara via pos.

■ Bersambung ke Hal 11



KPK Pastikan Penyidikan TPPU SYL Masih Berjalan

Jakarta, MIMBAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses penyidikan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) masih terus berlangsung, meskipun untuk perkara dugaan pemerasan dan

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat

11 SYA'BAN 1445 H

Subuh : 05:23 WIB	Maghrib : 18:42 WIB
Zuhur : 12:42 WIB	Isha : 19:52 WIB
Ashar : 16:00 WIB	■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah

Perbanyak Sabar

Oleh Dr A Rasyid, MA



"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Surat Al-Baqarah 153: Allah SWT Bersama Orang-orang yang Sabar

Ternyata memiliki sifat penyabar itu sangat penting dimiki

■ Bersambung ke Hal 11

USUT KECURANGAN PEMILU DPR Didorong Gunakan Hak Angket

Tito Bantah Ada Desain Kecurangan Pemilu

MENTERI Dalam Negeri yang juga Plt Menko Polhukam Tito Karnavian mengklaim tak ada desain kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam gelaran Pemilu 2024.

■ Bersambung ke Hal 11

Koalisi Perubahan Siap Beri Dukungan

PASANGAN calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menanggapi ajakan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk mengajukan hak angket atau interpelasi di DPR

■ Bersambung ke Hal 11



Jakarta, MIMBAR - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajak partai-partai koalisi pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menggulirkan hak angket atau interpelasi di DPR untuk mendalami dugaan kecurangan Pilpres 2024. AMIN kini didukung oleh koalisi PKS, PKB dan NasDem.

"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata mantan Gubernur Jateng dikutip dari keterangan tertulis TPN Ganjar-Mahfud, Senin (19/2). Hak angket adalah salah satu dari tiga hak yang dimiliki DPR. Hak angket merupakan hak

■ Bersambung ke Hal 11



Hari Ini Jokowi Lantik Menteri ATR/BPN dan Menko Polhukam

Jakarta, MIMBAR - Hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik dua menteri, yakni Menteri ATR/BPN dan Menko Polhukam. Demikian diungkapkan Koordinator Stafpres Presiden, Ari Dwipayana.

"Rabu besok (hari ini, red), 21 Februari 2024, pukul 11.00 WIB, diagendakan pelantikan Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

■ Bersambung ke Hal 11

Baznas Kirim 14 Truk Bantuan ke Palestina

Medan, MIMBAR - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI bekerja sama dengan lembaga filantropi Mesir, Mishr Al-Kheir, mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina sebanyak 14 truk kontainer melalui Pintu Rafah Mesir, Senin (19/2).

"Bantuan yang dikirim hari ini merupakan aksi nyata masyarakat Indonesia dalam membantu Palestina setelah sebelumnya Baznas mengirimkan bantuan sebanyak 16 truk kontainer, khusus yang bekerja sama dengan Mishr Al-Kheir pada akhir Desember 2023 lalu," kata Wakil

■ Bersambung ke Hal 11

Sirekap Disoal, Suara Caleg Tiba-tiba Raib

KPU Dituding Sebar Hoaks

PENGUNAAN Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk mengakumulasi perolehan suara peserta Pemilu 2024, dinilai kacau. Kondisi itu menimbulkan kekecewaan dari sejumlah Calon Anggota Legislatif dari Sumatera Utara.

Salah satunya, Zul Effendi Gultom. Caleg DPR RI dari Partai Bulan Bintang Dapil Sumut 1 Nomor Urut 5 terkejut saat melihat suaranya mendadak menghilang ribuan suara. Dilihat pada 17 Februari 2024 lalu, suara untuk Zul Gultom Effendi telah 4.212, tetapi dua hari kemudian (19 Februari 2024), jumlah suaranya turun drastis, hanya 147 saja. Mendapati kondisi ini, Selasa (20/2) kemarin ia pun mendatangi Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara untuk meminta klarifikasi atas raibnya suara yang diperolehnya. Tapi sayang, tak ada seorang pun komisioner KPU Sumut yang berada di tempat, begitu juga dengan staff yang berkompeten memberikan keterangan. "Saya hanya ingin meminta klarifikasi, kenapa suara saya tiba-tiba hilang dari Sirekap, itu saja," tanya Zul Effendi Gultom kepada salah seorang

petugas di KPU Sumut. Namun tak diperoleh jawaban yang diharapkan. Menyikapi hal ini, Zul Effendi Gultom menyatakan bahwa KPU telah menyebar hoaks dan telah merugikan peserta pemilu, yang di antaranya Caleg yang ikut berkompetisi dalam Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) pada 14 Februari 2024 lalu. "Petugas KPU yang telah digaji dengan uang rakyat, benar-benar telah mengecewakan



dan bekerja tidak profesional," ungkapnya. Tak hanya Zul Effendi Gultom saja,

■ Bersambung ke Hal 11

■ Maenkan kang ...
■ Hehehe ...



SEMPAT DIHENTIKAN, BANTUAN PANGAN BERAS KEMBALI DIGULIRKAN :

Sempat dihentikan sementara untuk menghindari politisasi program pangan pemerintah ini. Bantuan Pangan Beras ke Keluarga Penerima Manfaat kembali digulirkan. Bantuan Pangan Beras ini dapat dipastikan tujuannya adalah membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang membutuhkan. (Foto Liputan6.com)

Migrant Care...

Dari Halaman 1

Dalam video yang diterima, video tersebut direkam pada 10 Februari 2024. Dalam pemantauan Migrant Care, kotak pos yang terletak di setiap jalur tangga apartemen itu tanpa penjagaan sama sekali.

Isi kotak pos terhambur dan berceceran. Migrant Care menduga celah ini dimanfaatkan oleh semacam sindikat 'pedagang susu' alias pedagang surat suara.

"Ini lah yang dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang surat suara itu tadi. Mereka memang sengaja mencari dari kotak pos satu, ke kotak pos yang lainnya, akhirnya dari satu, dua, sembilan,

sepuluh, sampai terkumpul banyak (surat suara)," kata staf Migrant Care, Muhammad Santosa, dalam kobfrensi pers di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (20/2).

Santosa pun menjelaskan, modus para pedagang surat suara itu akan bergerak setelah mengetahui surat suara dikirim melalui jasa ekspedisi ke kotak pos tujuan.

"Mereka kerjanya tim, tidak sendiri-sendiri, di daerah mana, siapa, di daerah mana, siapa. Mereka akan memanfaatkan lemahnya pengawasan. Apalagi, panitia pengawas luar negeri (panwas LN) tak punya pengawas pos," sambungnya.

Dia mengatakan, setelah mengumpulkan surat suara dari pos, mereka akan bernego harga ke

peserta pemilu yang membutuhkan suara.

"Misalkan si caleg membutuhkan sekian ribu, sekian ratus, di situ lah tarik-menarik harga sekian ringgit itu terjadi. Misalnya 1.000 surat suara dari Malaysia nih, lalu pedagang susunya 'oke saya kasih 1 surat suara 25 ringgit atau satu suara 50 ringgit,'" ungkapnya.

Modus ini, lanjutnya, bukanlah masalah baru. Maka pihaknya pun mendesak agar pemungutan suara melalui pos dihapuskan untuk pemilu selanjutnya.

"Minimnya pengawasan pada metode pos berimplikasi pada dugaan perdagangan surat suara. Maka dari itu kami meminta Bawaslu untuk menghapus metode pos," imbuhnya. (det/js)

DPR Didorong...

Dari Halaman 1

DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ada syarat-syarat tertentu bagi DPR untuk menggunakan salah satu dari dua hak tersebut. Untuk hak interpelasi, syaratnya diusulkan oleh minimal 25 orang dari anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Selain itu, untuk mengajukan hak interpelasi DPR harus menyertakan sejumlah do-

kumen. Sementara syarat hak angket salah satunya adalah diusulkan paling sedikit oleh 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi.

Ganjar mengaku telah mengusulkan wacana hak angket kepada partai pengusungnya di DPR seperti PDIP dan PPP dalam rapat internal 15 Februari lalu.

Namun, usulan itu harus mendapat banyak dukungan partai lain agar memenuhi syarat lebih dari 50 persen anggota dewan.

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," kata Ganjar.

Ia menilai dugaan kecurangan Pemilu dan Pilpres 2024 harus disikapi dengan serius. DPR, lanjutnya, harus meminta penjelasan KPU selaku penyelenggara pemilu.

Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat berupa foto,

dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024.

Dia menilai ketelanjangan dugaan kecurangan Pilpres 2024 tak bisa dibiarkan, terlepas apapun kepentingan politik dan dukungan pada paslon tertentu. Ganjar karenanya mendorong anggota dewan memanggil para penyelenggara Pemilu untuk diminta pertanggungjawaban.

"Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan dibiarkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan," ungkap Ganjar.

Terpisah, Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni mengaku masih menunggu arahan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh untuk membahas usulan Ganjar.

"Dari NasDem belum ada pembahasan apa apa, karena kami menunggu arahan dari ketua umum," kata Sahroni, Selasa (20/1). (cnni/js)

Tito Bantah...

Dari Halaman 1

"Kalau ada kekurangan sana sini ya mungkin terjadi. Yang penting tak ada desain terstruktur sistematis dan masif," kata Tito usai menghadiri acara BNPT di Menara Bidakara, Jakarta, Selasa (20/2).

Tito menuluki momen pemilu di Indonesia sebagai 'the biggest one day election in the world'. Sebab, ia mengatakan negara-negara lain di dunia tak menggelar pemilu dalam hitungan satu hari saja. "India itu hampir dua bulan lebih prosesnya per negara bagian. Amerika juga per negara bagian, berturut-turut beberapa bulan. Kita hanya one day, ditambah legislatif. Maka itu komplikasi. Memobilisasi orang untuk memilih

itu bukan pekerjaan yang mudah," ujarnya.

Mantan Kapolri itu mengakui jika masih ada kekurangan Pemilu di beberapa bagian, semisal salah input atau sekadar surat suara yang rusak.

Tito menyarankan kandidat menggunakan mekanisme resmi jika tak puas atau keberatan terhadap hasil pemilu. "Saya sarankan gunakan mekanisme yang ada. Ada bukti, laporkan Bawaslu. Enggak puas Bawaslu ada DKPP, nanti ada proses lain MK. Jadi jalur-jalur resmi disampaikan. Gunakan jalur itu," katanya.

Protes terhadap hasil Pemilu 2024 yang diduga diliputi kecurangan kini mengemuka. Salah satunya datang dari puluhan organisasi relawan Ganjar-Mahfud mengeluarkan 'Petisi Brawijaya' yang menolak hasil Pilpres 2024 dan meminta

Koalisi Perubahan...

Dari Halaman 1

terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Anies menyebut tiga partai yang tergabung di Koalisi Perubahan yakni PKS, PKB, dan NasDem siap untuk jadi bagian dan memuluskan inisiasi tersebut di DPR. "Saya yakin partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu," kata Anies di Yusuf Building Law Firm, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).

Anies mengaku kubunya telah menyiapkan data-data yang diperlukan untuk mengajukan hak angket tersebut.

Ia menyebut proses pengajuan hak angket dapat berjalan di DPR di bawah kepemimpinan PDIP sebagai partai dengan kursi terbesar. Lebih lanjut, Anies menilai inisiasi yang digulirkan

oleh kubu Ganjar-Mahfud ini adalah suatu hal yang baik.

"Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar maka proses DPR bisa berjalan," jelas dia.

Di sisi lain, Cak Imin selaku cawapres sekaligus Ketua Umum PKB mengaku siap untuk memuluskan inisiasi tersebut di DPR.

"Siap," jawab dia singkat.

Sementara, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebut partai-partai pengusungnya sudah membahas rencana penggunaan hak interpelasi di DPR untuk mendalami dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

"Iya, ya interpelasi itu dibicarakan tetapi itu rapat partai pengusung," kata Mahfud di kawasan Kramat, Jakarta Pusat, Selasa (20/2).

KPU Dituding...

Dari Halaman 1

perolehan suara yang termuat dalam Sirekap tidak sesuai dengan yang tercatat di formulir C Hasil Plano, seharusnya menjadi alasan dilakukannya audit oleh lembaga independen.

"Kekacauan Sirekap Digital KPU perlu dijawab dengan dilakukannya Audit Digital Forensik atas Sirekap dan Sistem Data Server KPU," ujar Mahfud melalui media sosial X, Selasa (20/2).

Dia memandangi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tidak bisa meng-

klaim Sirekap sudah diaudit oleh lembaga berwenang.

Justru menurut Mahfud, audit oleh lembaga di luar pemerintahan dapat memastikan masalah selisih data perolehan suara yang termuat di Sirekap bisa ditemukan dan terungkap jelas. "Yang mengaudit harus lembaga independen, bukan lembaga yang berwenang. Sudah deras usul dari masyarakat agar KPU memenuhi usul dilakukannya audit digital tersebut," demikian Mahfud. (A-10/det)

KPK Pastikan...

Dari Halaman 1

gratifikasi sudah dilimpahkan ke pengadilan.

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya masih terus mengusut dugaan TPPU SYL. "Adapun mengenai proses penyidikan dengan dugaan TPPU untuk tersangka SYL dkk, sejauh ini masih berproses," kata Ali kepada wartawan, Selasa (20/2).

Ali memastikan, perkembangan dari proses penyidikan TPPU SYL ini akan terus disampaikan kepada publik, baik saksi-saksi yang dipanggil, maupun aset-aset yang disita nantinya.

"Perkembangannya selalu kami sampaikan pada masyarakat," pungkas Ali.

Pada hari ini, Jaksas KPK,

Meyer Volmar Simanjuntak telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan Syahrul Yasin Limpo dkk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) para Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

SYL akan didakwa melakukan pemerasan kepada para pejabat Eselon I beserta jajaran di Kementerian Pertanian (Kementan), termasuk dengan penerimaan gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar.

Untuk itu, penahanan terhadap Syahrul Yasin Limpo dan dua orang lainnya, yakni mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Kasdi Subagyo dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan, Muhammad Hatta beralih menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor Jakarta. (rm/js)

Hari Ini...

Dari Halaman 1

BPN oleh Presiden di Istana Negara," kata Ari kepada wartawan, Selasa (20/2).

Namun, Ari tidak menyebut siapa yang akan dilantik. Ari meminta publik menunggu hari ini.

"Mengenai siapa yang akan diangkat dan dilantik oleh Bapak Presiden untuk mengisi dua posisi itu, kita tunggu besok (hari ini) ya," ujarnya.

Ari mengatakan, selain pelantikan, akan ada pengucapan sumpah dan janji jabatan anggota komisi kejaksaan.

"Selain itu, akan ada pengucapan sumpah/janji anggota Komisi Kejaksaan di hadapan Presiden yang juga diselenggarakan di Istana Negara,"

ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi buka suara soal kabar reshuffle dan pelantikan menteri hari ini. Jokowi tidak membuka terang-terangan dan meminta publik untuk menunggu hari ini.

"Besok (hari ini) ditunggu jam 10," kata Jokowi kepada wartawan di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/2).

Saat dikonfirmasi apakah pejabat yang dilantik adalah Hadi Tjahjanto dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jokowi tidak menjawab. Dia hanya mengulang jawaban kegiatan pelantikan akan digelar hari ini. "Besok dilihat jam 10," kata Jokowi. (det/js)

Baznas Kirim...

Dari Halaman 1

Ketua Baznas RI Mo Mahdum dalam keterangannya, Selasa (20/2).

Mo Mahdum mengatakan, bantuan yang dikirimkan berupa kushari (makanan khas Mesir), biskuit, dan bahan-bahan makanan lainnya. "Kami akan terus mengirimkan bantuan-bantuan lainnya ke Palestina," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama Komunikasi Mishr Al-Kheir, Dr Thariq Hasan Muhammad menyampaikan, bantuan kemanusiaan masyarakat Indonesia melalui Baznas sangat berarti bagi

masyarakat Palestina.

Tariq mengatakan, bentuk kerja sama Mishr Al-Kheir bersama Baznas RI dalam bantuan Palestina, yang sangat diprioritaskan saat ini adalah penyaluran bantuan-bantuan ke Palestina berupa bahan-bahan makanan, kesehatan, dan hal-hal yang bersifat darurat.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo Mesir, Baznas Indonesia, lembaga-lembaga filantropi asal Indonesia lainnya, dan secara umumnya kepada masyarakat Indonesia," kata Thariq. (rm/js)



Perbanyak Sabar

Dari Halaman 1

oleh setiap manusia, sebab tanpa kesabaran sering kali membuat seseorang terjerumus dalam kesengsaraan baik di dunia mau pun di akhirat. Karena itu sangat penting bagi kita memahami makna sabar itu dengan baik dan sungguh-sungguh.

Sabar (al-shabru) menurut bahasa adalah menahan diri dari keluh kesah. Bersabar artinya berupaya sabar. Ada pula al-shibru dengan mengkasrah-kan shadartinya obat yang pahit, yakni sari pepohonan yang pahit. Ada yang berpendapat, "Asal kalimat sabar adalah keras dan kuat. Al-Shibru tertuju pada obat yang terkenal sangat pahit dan sangat tidak menyenangkan.

Ada pula yang berpendapat, "Sabar itu diambil dari kata mengumpulkan, memeluk, atau merangkul. Sebab, orang yang sabar itu yang merangkul atau memeluk dirinya dari keluh-kesah. Ada pula kata shabrah yang tertuju pada makanan. Pada dasarnya, dalam sabar itu ada tiga arti, menahan, keras, mengumpulkan, atau merangkul, sedang lawan sabar adalah keluh-kesah.

Dalam agama, sabar merupakan satu di antara stasiun-stasiun (maqamat) agama, dan satu anak tangga dari tangga seorang salih dalam mendekati diri kepada Allah. Struktur maqamat agama terdiri dari 1 Pengetahuan (ma'arif) yang dapat dimisalkan sebagai pohon, 2. sikap (ahwal) yang dapat dimisalkan sebagai cabangnya, dan 3 perbuatan (amal) yang dapat dimisalkan sebagai buahnya.

Seseorang bisa bersabar jika dalam dirinya sudah terstruktur maqamat. Sabar bisa bersifat fisik, bisa juga bersifat psikis. Karena sabar bermakna kemampuan mengendalikan emosi, maka nama sabar berbeda-beda tergantung obyeknya.

Ketabahan menghadapi musibah, disebut sabar, kebalikannya adalah gelisah (jaza') dan keluh kesah (hala'). Menghadapi godaan hidup nikmat disebut, mampu menahan diri (dlobith an nafs), kebalikannya adalah tidak tahan (bathar). Kesabaran dalam peperangan disebut pemberani, kebalikannya disebut pengecut.

Kesabaran dalam menahan marah disebut santun (hilm), kebalikannya disebut pemarah (tazammur). Kesabaran dalam menghadapi bencana yang mencemak disebut lapang dada, kebalikannya disebut sempit dadanya. Kesabaran dalam mendengar gossip disebut mampu menyembunyikan rahasia (katum).

Kesabaran terhadap kemewahan disebut zuhud, kebalikannya disebut serakah, loba (al hirsh) Kesabaran dalam menerima yang sedikit disebut kaya hati (qana' ah), kebalikannya disebut tamak, rakus (syarahun).

Bagaimana pula posisi sabar ini kita tempatkan pada kenyataan politik yang terjadi saat ini di tanah air. Tentu saja bagi para pemain politik yang belumberuntung sebaiknya bersifat sabar, bagi yang menang juga diminta untuk tetap sabar dengan kemenangannya. Karena itu tidak ada yang perlu dikecewakan dalam hidup ini. Paling tidak kita menyadari bahwa semua itu sudah menjadi ketentuan Allah. Kesabaran kita sekali mendapat ujian. (*)